



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
x	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Diduga Selewengkan DD Dan ADD

Kades Nangai Amen Dipanggil Jaksa

LEBONG, BE - Diduga melakukan penyelewengan anggaran desa (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) tahun 2018 yang mencapai ratusan juta rupiah, Kepala Desa (Kades) Nangai Amen Kecamatan Lebong Utara, berinisial DC (38) diperiksa oleh Kejaksaan negeri (Kejari) Lebong.

Data terhimpun, dugaan penyelewengan yang dilakukan Kades Nagai Amen, yaitu DD sebesar Rp 715 juta dan ADD sebesar Rp 357 juta tahun 2018. Dari DD dan ADD yang diterima, dipergunakan untuk berbagai kegiatan seperti pembangunan jalan desa yang anggarannya dari DD sebesar Rp 608 juta. Akan tetapi hingga akhir tahun 2018 yang lalu, pembangunan jalan tak kunjung selesai.

Ada juga masalah pernyataan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebesar

Rp 60 juta, namun diduga tak pernah disetorkan. Adajuga masalah pengadaan baju dinas lengkap dengan nilai sebesar Rp 13,5 juta, tunjangan perangkat desa sebesar Rp 18,9 juta yang belum dibayarkan sepanjang tahun 2018, serta masih ada dugaan penyimpangan-penyimpangan lainnya. Oleh karena itulah, warga Desa nangai Amen melaporkan hal tersebut ke Kejari Lebong.

Pemeriksaan sendiri dilaksanakan kemarin (01/08), selain kades Nangai Amen,

turut dipanggil sebagai saksi untuk dimintai keterangan yaitu 2 orang Pegawai negeri Sipil (PNS) yaitu Kepala Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa (PMD) Dinas PMDS dan staf Badan Keuangan Daerah (BKD) Lebong.

Kepala Kejari (Kajari) Lebong Endang Sudarmah SH MH melalui Kasi Pidsus Eddy Sugandi Tahir SH, mengatakan bahwa pemanggilan Kades Nangai Amen maupun PNS dilingkup Pemkab Lebong, untuk menindaklanjuti atas laporan yang sebelumnya telah diterima oleh pihaknya.

nya telah diterima oleh pihaknya.

"Sebelumnya masyarakat melapor kepada kita, atas dugaan korupsi DD dan ADD yang dilakukan oleh Kadesnya," jelasnya, kemarin (01/08).

Untuk kasus yang saat ini ditangani, saat ini masih melakukan Pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket0 dan Pengumpulan data (puldata) dari pihak terkait. Untuk itulah pihaknya melakukan pemanggilan terhadap Kades desa setempat.

"Kita menanyakan terkait

penggunaan DD dan ADD yang diterima desa pada tahun 2018 yang lalu, setidaknya ada 20 pertanyaan yang kita lontarkan," sampainya.

Sementara untuk 2 orang PNS dari Dinas PMDS dan BKD, pihaknya mempertanyakan mekanisme dalam pencairan DD dan ADD pada Desa Nangai Amen di tahun 2018 yang lalu. Karena dalam mekanisme pencairan DD dan ADD, kedua OPD tersebut yang melakukan penguasaan dalam pencairan DD dan ADD.

"Kita hanya menanyakan

mekanisme pencairan saja," ucapnya.

Setelah melakukan pemanggilan terhadap Kades dan 2 PNS, pihaknya kembali akan memanggil beberapa orang saksi lagi terkait dugaan kasus yang ditanganinya. Setelah selesai maka nantinya akan dinai-kan ketahap penidikan jika ada indikasi penyimpangan yang dilakukan Kades tersebut.

"Sebelumnya akan kita ekspose internal sebelum menaikan kasus," tutupnya. (614)